PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI BMT NURUL BAROKAH

Nafilah Amalia Syahida

E-mail: syahidanafilah@gmail.com

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Moch. Najib Imanullah

E-mail: imanullahnajib@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Mulyanto

E-mail: Mulyanto1103@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Islamic law; Murabahah; Sharia Cooperative*

Kata Kunci: Hukum Islam; Koperasi Syariah; Murabahah;

Abstract

As a predominantly Muslim country, Indonesia has both conventional and Islamic financial institutions. Murabahah was the most commonly requested financing by customers to fulfill needs and provide capital goods. However, with its high demand, various issues often arose in murabahah financing due to multiple factors. This research employed an empirical and descriptive-analytical method, utilizing both primary and secondary data. The factors causing problematic murabahah contracts at BMT Nurul Barokah were due to internal and external issues of the customers or the institution. To address these problematic financings, BMT Nurul Barokah employed various efforts, including litigation, non-litigation, and collateral auction, with different approaches depending on the customer's condition at the time.

Abstrak:

Sebagai negara dengan mayoritas muslim indonesia memiliki lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Murabahah sendiri merupakan pembiayaan yang paling sering diajukan oleh nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan maupun barang modal. Dengan banyaknya peminat acap kali pembiayaan murabahah muncul berbagai masalah yang mengikuti dengan berbagai macam faktor penyebab. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris, dan bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Faktor penyebab akad murabahah yang bermasalah BMT Nurul Barokah dikarenakan faktor internal maupun eksternal nasabah atau BMT Nurul Barokah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut BMT Nurul Barokah menggunakan berbagai upaya, termasuk upaya litigasi, non-litigasi hingga lelang jaminan. namun upaya yang diterapkan berbeda tergantung pada kondisi nasabah saat itu.

A. Pendahuluan

Hukum syara' dalam Islam merupakan setiap hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist. Secara umum banyak ulama sepakat bahwa objek kajian dalam ilmu fiqh ialah Ibadah dan Muamalah. Qodri Azizy yang menyamakan antara fiqh muamalah dengan ekonomi Islam karena termasuk cabang dari ilmu keIslaman lain dan bukan merupakan cabang daripada ilmu ekonomi sekuler. (Nur Khusna et al., 2021, 65–66). Di Indonesia sendiri dalam hal ekonomi terdapat bank konvensional dan bank dengan konsep syariah. Perkembangan perbankan syariah termasuk cepat karena ditunjang dari keyakinan dari masyarakat muslim bahwa bank konvensional terdapat unsur riba (Suib, 2017, 4). Lembaga Keuangan Syariah ialah badan usaha yang memiliki prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan, dan dibagi dalam dua bentuk yakni lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Nurzianti, 2021, 40).

Salah satu lembaga keuangan non-bank ialah koperasi syariah yang berperan pada sebagai lembaga keuangan termudah yang dijangkau oleh masyarakat dimana operasionalnya mirip dengan bank syariah. Selain menjadi sarana edukasi untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya riba, gharar, dan unsur lainnya yang dilarang dalam Islam, koperasi syariah juga menjadi penyedia modal bagi pelaku UMKM (Hutagalung & Batubara., 2021, 1494). BMT Nurul Barokah sendiri merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi yang memiliki tujuan dalam membantu peningkatan taraf hidup masyarakat terkhusus pada pemberdayaan ekonomi umat. Berbagai produk yang diluncurkan oleh BMT Nurul Barokah terdiri dari simpanan atau tabungan dan pembiayaan. Diantara produk pembiayaan yang populer ialah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan termasuk barang modal. pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank-bank syaria'ah memiliki jangka waktu di bawah atau di atas satu tahun (*long run financing*). Namun pembiayaan murabahah juga dapat mengalami masalah dalam pelaksanaannya, diantara faktor penyebabnya ialah kondisi perekonomian, kesalahan penggunaan pembiayaan, atau pun manajemen yang buruk. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati (Kina, 2017, 396–397).

Penelitian berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis” oleh Hastuti dan Rohmah (2021) membahas faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan penanganannya di BMT NU Sejahtera yang terjadi pada masa pandemi covid (Hastuti & Rohmah, 2021), dan perbedaan dengan penelitian ini dilakukan pada keadaan normal pasca-pandemi dan di lokasi yang berbeda.

Penelitian oleh Irfan Harmoko (2018) yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” membahas mekanisme restrukturisasi secara teori dalam akad murabahah (Harnoko, 2018). dan yang menjadi berbeda ialah dalam penelitian ini dilakukan secara empiris di BMT Nurul Barokah,

karena pembiayaan murabahah yang bermasalah ini pada akhirnya akan menyebabkan kerugian bagi BMT Nurul Barokah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana penyelesaian perkara murabahah secara normatif di BMT Nurul Barokah. Diharapkannya penulisan ini dapat memiliki implikasi praktis bagi BMT Nurul Barokah serta lembaga keuangan syariah lainnya.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini terdiri dari data primer berupa pengamatan langsung di BMT Nurul Barokah, dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep murabahah

Ribhu adalah asal kata dari murabahah yang berarti keuntungan, dimana penjualnya ialah bank dan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran yang dicantumkan pada akad jual beli dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad, harga jual ini berupa harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Dalam akad murabahah barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan (Makkulau & Abdullah, 2017, 4). Murabahah idealnya menerapkan prinsip syariah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah ini berarti kegiatan murabahah dilarang memuat unsur riba (penambahan pendapatan secara tidak sah), maisir (transaksi untung-untungan), haram (objek transaksi yang dilarang dalam syariah), gharar (transaksi yang tidak jelas), dan zalim (ketidakadilan bagi pihak lain).

Kepemilikan sah dan penuh menjadi dasar jual beli *murabahah*, ini berarti barang harus dibeli oleh pihak bank atas nama sendiri lewat jual beli yang bebas unsur riba dan sah, baru setelah itu barang tersebut dijual ke nasabah sesuai proses jual beli *murabahah*, yakni dengan menyebutkan harga jual dan keuntungannya. Akad yang berdasarkan kepercayaan (amanah) ini harus terpenuhi dalam jual beli *murabahah*, karena pembeli percaya pada penjual yang mengatakan harga pertama tanpa saksi dan bukti. Sebaliknya akad *murabahah* akan batal jika penjual tidak menjelaskan harga awal terhadap pembelian barang, (Bakry & Masse, 2020, 10). Di BMT Nurul Barokah jika seseorang ingin mengajukan pembiayaan murabahah terkhusus pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian kendaraan maka ia harus mendaftarkan diri sebagai anggota BMT Nurul Barokah. Setelah menjadi anggota ia diharuskan menentukan objek murabahah secara pasti, kemudian pihak BMT Nurul Barokah akan membeli barang

tersebut barulah kemudian barang tersebut dijual dengan harga asli ditambah margin keuntungan yang telah disepakai bersama.

Pada praktiknya perhitungan margin dapat dilakukan dengan metode anuitas dan flat agar menjadikan margin tidak sama dengan bunga. Tentu saja metode ini harus sesuai dengan prinsip keadilan. Metode flat biasa digunakan untuk pembiayaan jangka pendek sampai 5 (lima) tahun, sedangkan metode anuitas untuk jangka waktu diatas lima tahun. Bagi nasabah kedua metode ini memiliki jumlah angsuran yang hampir sama. Sedangkan bagi bank metode anuitas lebih menguntungkan karena pengakuan akumulasi pendapatan margin lebih cepat dan lebih besar dibandingkan metode flat (Arisa, 2020, 144–146).

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menyatakan bahwa nasabah dapat dikenai sanksi apabila ia mampu namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Karena hal ini berdampak pada pembiayaan macet serta rasio antara pendapatan dan pembagian keuntungan pada nasabah akan terganggu. Terdapat dua model sanksi dalam praktek perbankan syariah, yang berupa denda (*ta'zir*) dan sanksi mengganti kerugian (*ta'wid*). Denda *ta'zir* ditetapkan sebagaimana dalam akad dan diperuntukkan untuk dana sosial. Sedangkan *ta'wid* ialah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi (Bakry & Masse, 2020, 18).

2. Permasalahan dalam pembiayaan murabahah

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang dimana nasabah tidak dapat menepati jadwal angsuran pembayarannya karena belum mencapai atau memenuhi target yang diharapkan oleh bank, dimana nasabah kesulitan atau macet dalam membayar angsurannya (Hana & Raunaqa, 2022, 33). Pada kenyataannya pelaksanaan akad murabahah terkadang muncul hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pada sisi bank faktor yang muncul biasanya disebabkan karena standar pemberian kredit longgar, manajemen kredit yang lemah, sampai bank tidak mampu membaca perubahan kondisi ekonomi. Sedangkan dari pihak nasabah yang mengalami gagal bayar karena perubahan kondisi keuangan nasabah. Namun ada juga oknum nasabah mampu namun tidak mau membayar (Pertiwi et al., 2020, 119).

Pada lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8/22/DpbS tanggal 18 Oktober 2006 disebutkan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan murabahah berdasarkan kemampuan bayar oleh nasabah, yaitu penggolongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Isnaeni selaku manager BMT Nurul Barokah, mengatakan bahwa pembiayaan murabahah dikatakan bermasalah apabila sudah tergolong pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan faktor yang menyebabkan akad murabahah bermasalah dikarenakan 3 (tiga) hal:

- a. Faktor internal BMT Nurul Barokah. Yang pertama dari sisi BMT, saat survei mengenai calon nasabah, BMT melakukan kesalahan penilaian karena narasumber hanya mengenal calon nasabah secara pribadi tanpa mengetahui kondisi keuangannya. Kurangnya penilaian karakter calon nasabah mengakibatkan hasil analisis yang kurang akurat mengenai kapasitas pendapatan dan pengeluaran calon nasabahnya.
- b. kondisi ekonomi nasabah yang berubah. Kondisi ekonomi nasabah memburuk setelah menandatangani akad murabahah, meskipun awalnya baik. Penurunan pendapatan oleh nasabah ini dapat terjadi seiring perubahan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Nasabah tidak bisa mengendalikan antara kebutuhan dan perilaku konsumtifnya sehingga terus mengajukan pembiayaan baru.

3. Penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah

Beberapa cara untuk melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah dapat ditempuh dengan cara berikut:

- a. *Rescheduling*: Keringanan dalam jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh debitur.
- b. *Reconditioning*: persyaratan yang ada diubah sesuai kesepakatan para pihak.
- c. *Restructuring*: dapat dilakukan dengan menambah jumlah angsuran, dengan menambah equity (saham), dengan menyeter uang tunai, dan tambahan dari pemilik.
- d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan ketiga cara di atas
- e. Yang terakhir penyitaan jaminan apabila nasabah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya (Khairan, 2020, 22).

Di BMT Nurul Barokah nasabah dengan kemampuan kurang bayar akan mulai di lakukan kunjungan ke nasabah guna mengingatkan kewajiban nasabah untuk membayar. Apabila cara ini tidak berhasil maka BMT akan melakukan kesepakatan kembali dengan nasabah. Bentuk kesepakatan itu berupa *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Kerap kali BMT Nurul Barokah menggunakan metode *Rescheduling* yaitu perubahan jadwal angsuran, pemberian atau penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan sebagaimana diatur pada pasal 126 KHES dan Fatwa DSN MUI No.48 tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Cara damai ialah langkah pertama apabila suatu pembiayaan mulai terindikasi bermasalah untuk mencari jalan keluarnya. Umumnya upaya damai di antara para pihak yang berselisih ditempuh lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. Negosiasi bilateral para pihak untuk menemukan kesepakatan dapat mengarah pada penyelesaian (Hardiati et al., 2021, 489). Pada prakteknya di BMT Nurul Barokah, cara damai ini

diimplementasikan dengan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*. Restrukturisasi secara damai ini bertujuan agar nasabah dapat melunasi hutang tanpa mengganggu usahanya, karena prinsip perdamaian ini adalah itikad baik dari para pihak untuk mencari jalan keluar bersama dapat dilakukan dengan *rescheduling* yang dikombinasi model lain sebagaimana tersebut di atas (Dewi et al., 2023, 231–234).

Jika kesepakatan dalam negosiasi tidak tercapai, maka mediator dapat dilibatkan untuk membantu mereka menemukan solusi. Jika sengketa tidak dapat dikompromikan, maka proses pengadilan secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya (Hardiati et al., 2021, 490). Hal ini juga diterapkan BMT Nurul Barokah apabila dengan cara damai masih belum berhasil, BMT Nurul Barokah akan mengeluarkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada nasabah yang masih menunggak pembayaran. Jika masih belum berhasil maka dikeluarkanlah somasi, dan langkah terakhir lewat litigasi maupun non-litigasi.

Apabila dalam akad disebutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maka BMT Nurul Barokah akan mengajukan ke Pengadilan Agama setempat, yaitu Pengadilan Agama Boyolali. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah (Hardiati et al., 2021, 494). Pengajuan gugatan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara sederhana sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, dan dengan acara biasa sesuai hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus (Rizki et al., 2019, 28).

Apabila dalam akad memilih untuk penyelesaian sengketa non-litigasi, arbitrase menjadi pilihan yang dapat dilakukan, dengan ketentuan perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis dan bersifat *accessoir*, klausul dibuat para pihak sebelum munculnya sengketa dan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa muncul (Zahra & Naim, 2019, 7). Salah satu lembaga arbitrase yang menawarkan biaya murah ialah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Berdasarkan Pasal 377 HIR yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, dan dalam arbitrase tidak dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (Supardin & JM Muslimin, 2022, 134). Apabila terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut dan pemohon dan termohon adalah pihak berwenang beracara di forum BASYARNAS, majelis arbitrase akan meminta para pihak mengupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi pada sidang pertama. Karena perdamaian merupakan hal mendasar dan harus diwujudkan dalam proses arbitrase sehingga harus diupayakan oleh arbiter namun tidak mengubah batas waktu pemeriksaan. Apabila mediasi berhasil, maka akan menghasilkan perjanjian perdamaian dan sebaliknya apabila gagal, maka acara pemeriksaan dilanjutkan (Umam & Nasution, 2023, 268). Langkah terakhir yang dilakukan BMT Nurul Barokah apabila nasabah belum selesai pembayarannya ialah

melakukan lelang jaminan dari nasabah. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Setelah jaminan tersebut di lelang hasilnya digunakan untuk membayar dana yang belum dibayar oleh nasabah, dan sisanya akan dikembalikan ke nasabah.

Di BMT Nurul Barokah, pembebasan nasabah yang tidak mampu membayar sisa hutang ini setelah dilakukan survei ulang kepada nasabah dan adanya surat pernyataan tidak mampu dari nasabah. Barulah terbit penghapusan piutang tak tertagih yang kemudian dana maal digunakan untuk menutup kekurangan tersebut. Perbuatan ini berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah tidak mampu membayar, jika nasabah benar-benar tidak mampu membayar sisa utangnya maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

D. Simpulan

BMT Nurul Barokah memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah. Dimulai dari cara persuasif yaitu mengingatkan nasabah, termasuk menggunakan cara *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Apabila tidak berhasil maka akan diberikan SP 1, 2, dan 3 dilanjutkan somasi. Jika tak berhasil juga maka dilakukan penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi maupun non-litigasi. Lelang jaminan akan dilakukan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutang, apabila nasabah terbukti tidak mampu membayar sisa hutang barulah BMT Nurul Barokah menerbitkan penghapusan piutang tak tertagih.

E. Saran

Beberapa saran bagi BMT yakni diperlukan pelatihan rutin bagi staf mengenai prosedur penanganan pembiayaan bermasalah, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja penanganan pembiayaan bermasalah. Perlunya mengedukasi nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan dan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, yang dapat dilakukan bersama dewan penasihat syariah untuk memberikan konsultasi dan solusi yang sesuai dengan hukum Islam kepada nasabah.

F. Daftar Pustaka

Jurnal

- Afifi T, & Naim, M. 2019. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama". *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Amilis K. 2017. "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare". *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2. Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- Andi. R.M.W, & Abdullah, M. W. 2017. “Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat”. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 3 No. 1. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Angga Arisa. 2020. “Konsep Al-Baaqiyaat As-Sholihat dalam Murabahah: Penentuan Margin aerta Penggunaan Metode Perhitungan Anuitas dan Flat”. *Khazanah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No.3. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Fathia N.K, Andi R.P, & Rifkah M. 2021. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah”. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 2. Manado: Prodi Perbankan Syariah IAIN Manado.
- Imron R.A., Safrin, S., & Andi M. 2019. “Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”. *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1. Makassar: Intutute for Learning Innovation and Counseling (ILIN Institute).
- Irfan Harmoko. (2018). “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Qawānin Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 2 No. 2. Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri.
- Khairan. 2020. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil”. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1. Kediri: Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
- Kharis F.H & Yoga R. 2022. “Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia”. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1. Kediri: IAIN Kediri.
- Khotib U, & Muhammad G. H. N. 2023. “Pemaknaan dan Implementasi Prinsip Ex Aequo Et Bono dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas”. *Veritas et Justitia*, Vol 9 No. 2. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Muammar B., Rahman. A. M. (2020). “Diskursus Prinsip Syariah dalam Akad Transaksi Murabahah Pada Perbankan Syariah di Makassar”. *Istinbāth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19 No. 1. Mataram: UIN Mataram.
- Muhammad I.S., & JM Muslimin. 2022. “Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah”. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol . 11 No. 2. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Muhammad S.S. 2017. “Resiko Pembiayaan Muḍ arobah (Strategi Meminimalisir Resiko Pembiayaan Muḍ arobah Pada Bank Syari’Ah)”. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Probolinggo.
- Muhammad W.R.H, & Sarmiana B. 2021. “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3. Surakarta: Institut Teknologi Bisnis AAS.

- Neni H., Sindi W., & Seproni H. 2021. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, Vol. 1 No. 5. Malang: Transpublika Publisher.
- Putri Maha Dewi. 2023. "Perjanjian Perdamaian Untuk Menciptakan Konsep Corporate Resque dalam Restrukturisasi Semi Publik Insolvency Law di Era Bisnis Modern". *Privat Law*, Vol. 11 No. 02. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Rahma N. (2021). "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 1. Mataram : STP Mataram.
- Risna. E.P., Yusman S., & Dwi R. 2020. "Faktor yang Memengaruhi Kredit Bermasalah Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia". *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 No. 1. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Yusriana M.H, & Siti N. R. 2021. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1. Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah tidak mampu membayar